

Siaran Pers

IDENTITAS HUKUM: PENGURANGAN KEMISKINAN DENGAN MEMBUKA AKSES PADA LAYANAN DASAR

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas hari ini (Kamis, 28 Juli) menyosialisasikan hasil studi *“Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia”* yang telah dilakukan di provinsi Aceh, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan tindak lanjut hasil studi dalam rangka melembagakan identitas hukum dan sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (*Civil Registration and Vital Statistics/CRVS*) pada layanan dasar.

Studi ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia yang menjadikan pencatatan sipil sebagai bagian dalam strategi pengurangan kemiskinan. Studi ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia di tingkat regional dalam *Asia-Pacific CRVS Decade 2024*, dan di tingkat global dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Kepemilikan identitas hukum sangat penting bagi setiap penduduk, tidak saja untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga, namun juga untuk melindungi berbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015, setidaknya sekitar 16,7 juta anak berusia 0-17 tahun belum memiliki akte kelahiran. Cakupan identitas hukum yang rendah terdapat pada kelompok penduduk yang miskin dan rentan, mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia tidak memiliki identitas hukum dan sulit mengakses berbagai layanan dasar.

"Saat ini ada sekitar 40 juta kelahiran anak Indonesia yang tidak tercatat dan mereka yang tidak memiliki identitas hukum akan mengalami kesulitan mengakses berbagai layanan dasar. Bersama Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia melalui *Australia Indonesia Partnership*-Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (AIP-KOMPAK), mendukung studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia guna memberikan rekomendasi terkait sistem pencatatan sipil yang efektif untuk mewujudkan pemenuhan akses layanan dasar bagi seluruh anak Indonesia", ungkap Fleur Davies, *Minister-Counsellor* Kedutaan Australia di Jakarta.

Studi yang menganalisis hambatan dan peluang dalam pencatatan kelahiran dan kematian ini bertujuan untuk menyediakan bukti-bukti tentang berbagai hambatan, kesenjangan, kekuatan, dan peluang dalam sistem yang ada saat ini, serta mengidentifikasi model-model dari berbagai negara yang dapat diperbandingkan dengan Indonesia, dan menilai keberagaman konteks di Indonesia agar menjadi dasar pemecahan masalah CRVS yang tepat.

Adapun hasil temuan dan analisis studi awal ini merekomendasikan: 1) perlunya reformasi kerangka peraturan dan hukum yang ada untuk menghapuskan diskriminasi, biaya akibat denda, dan mengatur pelimpahan tanggung jawab pencatatan sipil kepada pemberi layanan yang berada paling dekat dengan masyarakat, yaitu di tingkat kecamatan; 2) meningkatkan permintaan atas pencatatan sipil, akta kelahiran, dan akta kematian harus dikaitkan dengan akses terhadap berbagai layanan dasar; 3) berbagai proses pencatatan sipil hendaknya dibuat agar lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui layanan terpadu dan keliling; 4) perlunya peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan pencatatan sipil; dan 5) melakukan inovasi, khususnya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diarahkan pada penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan kemampuan penggagihan data.

Selain peluncuran hasil studi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan terhadap hasil studi terkait dengan layanan pencatatan sipil, kesehatan, pendidikan dan sosial serta mendapatkan masukan mengenai peran kecamatan dan desa dalam penyediaan layanan identitas hukum, pencatatan sipil dan statistik hayati.

Kegiatan ini mengundang kementerian terkait, pemerintah daerah lokasi studi, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, mitra pembangunan, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memperoleh umpan balik mengenai pendekatan yang efektif serta arahan dalam proses perencanaan kebijakan untuk meningkatkan kepemilikan identitas hukum dan menguatkan pencatatan sipil dan statistik hayati melalui layanan dasar.

“Diperlukan kerjasama yang kuat antar sektor, baik dari lembaga yang bertugas menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan maupun sektor bantuan dan perlindungan sosial. Penguatan kolaborasi secara vertikal juga diperlukan untuk memastikan tersedianya data yang akurat serta dinamis untuk perencanaan program pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pada tingkat desa. Dengan sistem CRVS yang baik, maka efektivitas kebijakan dan program yang telah dibuat menjadi semakin mudah diukur oleh Pemerintah,” ujar Rahma Iryanti, Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas.

Tentang AIP-KOMPAK

AIP-KOMPAK adalah sebuah fasilitas yang didanai Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target RPJMN 2015-2019, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan dasar, serta meningkatkan peluang-peluang ekonomi di sektor non-pertanian bagi kaum miskin. Bekerja di tingkat nasional dan sub-nasional, KOMPAK dikonsolidasikan dan dibangun berdasarkan investasi Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pemberdayaan masyarakat, pelayanan, pemerintahan, serta penguatan masyarakat melalui integrasi tiga bidang yang menyatu menjadi sebuah fasilitas.

Tentang PUSKAPA

PUSKAPA adalah lembaga yang membantu pembuat kebijakan meningkatkan akses anak-anak pada kesehatan, pendidikan, keadilan, dan perlindungan sosial, dengan menghasilkan bukti ilmiah melalui penelitian yang diperlukan dalam perumusan solusi atas ketimpangan kesejahteraan anak. PUSKAPA juga mendukung upaya-upaya perlindungan masyarakat yang paling rentan melalui advokasi kebijakan, rancangan program, uji coba, dan evaluasi.

Jakarta, 28 Juli 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31934283
Faksimile (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id